

ANALISIS KEPENTINGAN TIONGKOK UNTUK COMPLIANCE TERHADAP PARIS AGREEMENT UNFCCC 2015-2020

Ira Rahma Fariza, Firstyarinda Valentina Indraswari
Universitas Brawijaya

ABSTRACT

World problems related to climate change are in the spotlight of new discussions that are being hotly discussed again by countries. The formation and negotiation of the Paris Agreement is one of the real implementations that proves the seriousness of the international community in viewing the increasing temperature of the earth due to extreme climate change. China as the country with the largest greenhouse gas emission contributor in the world is a key actor in the success of the targets in the Paris Agreement. In the midst of its big ambitions to become the world's largest economy and industrial country, China is required to remain fully committed to the Paris Agreement program to contribute to the successful reduction of world greenhouse gas emissions by 2030. Maintain compliance with the Paris Agreement program in the midst of the dilemma of high domestic economic interests. This paper will be analyzed using explanative qualitative research methods and is equipped with Compliance Theory from Ronald B. Mitchell as an analytical tool. With the results of China's self-interest factor in the success of its compliance with the Paris Agreement as seen from the outputs, outcomes, and impact variables.

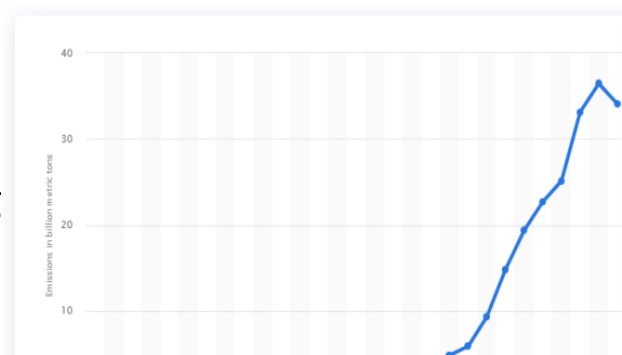
Keywords: *China, Paris Agreement, Gas Emissions, Interest, Compliance*

INTRODUCTIONS

Pemanasan global atau Global Warming, menurunnya kualitas dan kuantitas air, perubahan musim, permasalahan lingkungan yang parah, serta terjadinya cuaca ekstrem yang tidak menentu merupakan lima dampak nyata yang terjadi pada dunia saat ini (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Semakin meningkatnya suhu bumi yang memanas akibat dari tingginya pengeluaran emisi gas rumah kaca yang merusak lapisan atmosfer merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim. US National Academy of Sciences menyebutkan bahwa perubahan iklim merupakan suatu fenomena yang harus diwaspadai serta permasalahan penting yang mulai berdampak kritis dalam kehidupan manusia saat ini (Royal Society, 2020). Meningkatnya suhu bumi menjadi 1 derajat celsius atau sekitar 1,8 derajat fahrenheit setiap tahunnya sejak tahun 1900-an merupakan suatu hal kritis yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh penduduk bumi hari ini.

Data berdasarkan pengeluaran emisi gas rumah kaca dan karbon global menunjukkan semakin masifnya penggerusan lapisan atmosfer yang semakin meningkatkan resiko tinggi perubahan iklim.

Figure 1. Data Pengeluaran Emisi CO² Global 1750-2020 Metrik Ton Milliar



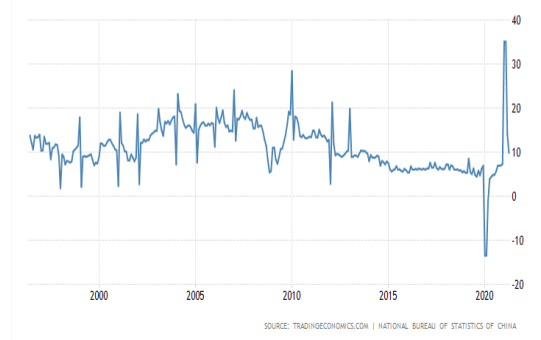
Sumber: (Statista, 2020)

Berdasarkan grafik tersebut, data meningkatnya emisi karbon dunia mengalami kenaikan signifikan di tahun 1970 hingga awal 2000-an, yakni seiring masifnya industrialisasi negara-negara pasca revolusi industri. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 2019 sebagai tahun tertinggi yakni 36,44 (Statista, 2020). Aktivitas manusia yang melakukan pembakaran bahan bakar fosil serta semakin menurunnya luas hutan merupakan faktor kontribusi utama dalam meningkatnya suhu bumi yang pada akhirnya akan membawa bumi pada perubahan iklim atau *climate change* yang parah. Dan hal ini seharusnya telah menjadi kekhawatiran bersama yang menjadi persoalan seluruh masyarakat internasional.

Menanggapi permasalahan ini, negara-negara di dunia telah mulai mengambil langkah serius sebagai penanganan masalah penting mereka. Dengan pembentukan UNFCCC atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* di tahun 1992 yang kemudian bertugas membentuk rezim internasional yang berkaitan dengan penanganan permasalahan perubahan iklim global (UNFCCC, 2021). UNFCCC kemudian mengeluarkan kesepakatan Protokol Kyoto di tahun yang sama sebagai langkah nyata. Meskipun demikian, di tahun 2012 implementasi Protokol Kyoto dianggap gagal akibat berbagai faktor. Absennya dukungan dan komitmen negara-negara besar, yakni Amerika Serikat yang sedari awal tidak mengambil langkah ratifikasi, juga lemahnya kepatuhan Tiongkok, Kanada, Jepang, dan Rusia menjadi salah satu kunci yang menyebabkan kegagalan implementasi protokol ini. Kegagalan Protokol Kyoto menjadi suatu dorongan baru bagi masyarakat global untuk melakukan pembenahan dalam pembentukan rezim internasional. Di tahun 2015, Paris Agreement hadir sebagai rezim internasional pengganti Protokol Kyoto. Menariknya, negosiasi penandatanganan rezim ini berjalan berhasil dengan mendapatkan dukungan sebanyak 92 negara hingga di tahun 2016. Pada tahun 2021, penandatanganan dan ratifikasi Paris Agreement berhasil mendapat dukungan dari 195 negara anggota termasuk negara-negara pemilik hegemon kekuasaan dunia yakni AS, Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, dan Kanada dengan 97% dari seluruh total pengeluaran emisi karbon global (UNTC, 2021). Di mana hal ini dapat dinilai sebagai langkah awal yang bagus dalam melihat optimisme rezim ini.

Hadirnya Tiongkok sebagai salah satu negara yang memberikan dukungan serta ratifikasi dalam Paris Agreement setelah absennya pada Protokol Kyoto menjadi salah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas. Jika dilihat dari sisi geopolitik, Tiongkok merupakan salah satu negara yang tengah sangat gencar dalam membangun pengaruhnya di bidang ekonomi dan perdagangan.

Figure 2. Produksi Industrialisasi Tiongkok 1990-2020



Sumber: (Trading Economics, 2020)

Lebih jauh, data di atas juga menunjukkan betapa signifikannya kepentingan ekonomi di bidang industrialisasi bagi Pemerintah Tiongkok. Industrialisasi Tiongkok terus meningkat secara masif di awal tahun 2000-an dengan angka tertinggi pada tahun 2019-2020 hingga 40% (Trading Economics, 2020). Serta posisi Tiongkok yang menjadi negara superior dengan menjadi partner dagang terbesar bagi negara-negara di dunia. Jika melihat dari penandatanganan dan komitmen Tiongkok atas implementasi Paris Agreement memang hal ini sedikit bertabrakan. Namun demikian, keberhasilan Tiongkok sebagai pionir dan aksi kerjasama teknologi lingkungan dengan AS dalam menyelesaikan Paris Agreement menjadi satu contoh komitmen kepatuhan yang nyata yang ditunjukkan Tiongkok selama implementasi awal dalam lima tahun berjalannya Paris Agreement.

Hal inipun menjadi bahasan menarik yang akan diteliti mengenai bagaimana atau apakah kepentingan Tiongkok dalam mendorong negaranya untuk menjaga tingkat compliance terhadap kesepakatan Paris Agreement UNFCCC di tengah kepentingan nasional ekonomi industrinya yang tinggi. Dengan dilengkapi Teori Compliance dari Ronald B. Mitchell (2007), artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi pemerintah Tiongkok dalam membawa negaranya untuk compliance terhadap Paris Agreement dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif eksplanatif. Penelitian ini akan difokuskan untuk melihat tahun kepatuhan Tiongkok pada tahun 2015-2020 yang didasarkan pada waktu terhitung dari waktu pembentukan Paris Agreement hingga 2020 dalam paruh Paris Agreement dijalankan. Namun demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal prediksi untuk memperhitungkan kepatuhan Tiongkok secara utuh hingga pada tahun 2030 mendatang.

ANALYTICAL FRAMEWORK

Dalam mengkonseptualisasikan compliance atau kepatuhan, Mitchell menjelaskan bahwa kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional adalah dilihat pada independent self interest dan interdependent self interest (Mitchell, 2007). Artinya dalam independent self interest, tingkat compliance suatu negara akan semakin meningkat jika suatu rezim tersebut semakin mewakili kepentingannya. Sedangkan, pada interdependent self interest, kepatuhan negara akan tergantung pada adanya enforcement yang diberikan secara direct oleh negara yang memiliki kekuasaan di atasnya sehingga dapat menekan negara di bawahnya untuk patuh.

Di sisi lain, Mitchell juga menyebutkan terdapat faktor lain yang tidak kalah penting dalam menjelaskan tingkat kepatuhan negara adalah terletak pada efektivitas dan kejelasan isi rezim tersebut (Mitchell, 2007). Rezim lingkungan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang cukup rendah. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan negara yang masih belum menempatkan isu lingkungan sebagai perhatian utama mereka. Oleh karena itu,

urgensi dan tidak adanya ambiguitas isi dari suatu rezim lingkungan juga merupakan faktor yang penting dilihat untuk menentukan sisi kepatuhan negara (Mitchell, 2007). Semakin efektif isi dan tidak ada ambiguitas dalam suatu rezim, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan oleh negara.

Mitchell juga mengklasifikasikan beberapa jenis perilaku negara terhadap kepatuhan dalam suatu rezim, diantaranya (Mitchell, 2007):

1. Treaty Induced Compliance

Merupakan keadaan ketika suatu negara memilih untuk patuh terhadap suatu rezim, karena kepentingan yang tidak ada relasinya dengan tujuan rezim.

2. Good Faith noncompliance

Merupakan perilaku negara ketika memutuskan untuk melakukan kewajibannya untuk patuh terhadap suatu rezim dengan melakukan suatu usaha nyata tetapi belum dapat mencapai komitmen yang telah disepakati. Hal ini mencakup ketika suatu negara sudah memiliki upaya terhadap komitmennya namun belum dapat memenuhi sesuai target kesepakatan.

3. Intentional Non-Compliance

Merupakan keadaan perilaku negara ketika suatu negara tersebut memutuskan untuk tidak compliance atau tidak patuh secara sengaja dan sadar. Hal ini cenderung disebabkan ketika isi suatu rezim tersebut tidak mawadahi kepentingannya atau adanya ambiguitas dalam isi suatu rezim, sehingga negara akan memilih untuk tidak patuh (Mitchell, 2007).

Dalam menentukan suatu negara untuk terhitung compliance atau tidak terhadap suatu rezim, terdapat tiga variabel yang dapat dilihat yakni: Outputs, Outcomes, dan Impact (Mitchell, 2007).

- **Outputs**

Dilihat ketika suatu negara yang dalam hal ini merupakan Tiongkok yang melakukan

adopsi atau ratifikasi suatu rezim tersebut ke dalam kebijakan atau hukum nasionalnya. Hal ini akan dilihat dari indikator bagaimana Tiongkok membuat suatu regulasi atau kebijakan yang juga memuat isi atau tujuan dari rezim tersebut. Hal ini dapat ditemukan dari bukti dokumen publik atau pernyataan resmi pemerintahan negara yang terkait.

- **Outcomes**

Adanya indikasi perubahan perilaku negara menuju tujuan dari rezim yang telah disepakati. Perubahan perilaku negara ini bersifat wajib. Dengan adanya perubahan perilaku Tiongkok akan dinilai sebagai upaya dan komitmen nyata dari suatu negara terhadap rezim.

- **Impact**

Impact atau dampak akan dilihat dari perubahan lingkungan yang terjadi, apakah menjadi lebih baik atau lebih parah. Namun demikian, impact juga tidak bisa menjadi jaminan apakah suatu negara langsung dapat dikatakan compliance atau non compliance, karena bisa jadi terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi

perubahan lingkungan ini (Mitchell, 2007). Dalam hal ini penulis akan melihat adanya perubahan data penurunan emisi gas karbon Tiongkok.

Dengan demikian, alur pemikiran dan hipotesis yang disusun adalah kepatuhan Tiongkok terhadap isi Paris Agreement dipengaruhi oleh faktor self interest Tiongkok yang dilihat dari variabel outputs, outcome, dan impact berdasarkan Teori Compliance dari Ronald B. Mitchell.

Dalam melihat kasus compliance Tiongkok dalam Paris Agreement, akan lebih ditekankan pada adanya sikap self interest di mana ini berkaitan dengan isu lingkungan yang menjadi salah satu core interest Tiongkok saat ini. Selanjutnya mengenai outputs, outcomes, dan impact akan dibahas lebih lanjut pada hasil dan pembahasan.

RESULT AND DISCUSSION

Kepentingan Tiongkok dalam Ratifikasi Paris Agreement: Independent Self Interest

Keikutsertaan Tiongkok dalam berbagai kegiatan dan konvensi terkait isu lingkungan merupakan suatu hal yang dinilai cukup kontroversial bagi masyarakat internasional. Melihat dari data emisi karbon yang cukup tinggi di dunia serta ambisi besarnya dalam industri dan ekonomi merupakan hal yang cukup berkebalikan dengan berbagai kontribusinya dalam isu lingkungan. Menurut laporan resmi dari pemerintah Tiongkok, laporan pengaduan masyarakat atas isu lingkungan semakin meningkat di tahun 2006 hingga pada angka 30% per-tahunnya hingga diproyeksikan terus meningkat dengan 450.000 aduan di tahun 2007 (Rochman, 2018). Lebih dari itu, menurut data UNFCCC, Tiongkok termasuk negara dengan pengeluaran gas emisi karbon rumah kaca terbesar di dunia.

Figure 3. 10 Besar Negara Penghasil Karbon Gas Rumah Kaca Terbesar Dunia Dan Tanggal Ratifikasi Pelaksanaan Dalam Paris Agreement Unfccc 2015

No	Negara	Persentase Emisi (%)	Tanggal Ratifikasi
1.	Tiongkok	20	3/9/2016
2.	Amerika Serikat	17	3/9/2016
3.	Uni Eropa	12,10	5/10/2016
4.	Russia	7,53	-
5.	India	4,10	2/10/2016
6.	Jepang	3,79	8/11/2016
7.	Brazil	2,48	21/09/2016
8.	Kanada	1,95	5/10/2016
9.	Meksiko	1,70	21/9/2016

10.	Indonesia	1,49	31/10/2016
-----	-----------	------	------------

Sumber: (UNFCCC, 2015)

Meskipun demikian, Tiongkok seperti terlihat terus ingin berupaya memainkan peran dalam isu lingkungan serta mengatasi permasalahan lingkungan domestiknya, walaupun di sisi lain implementasi ini dinilai kurang serius jika melihat dari masih banyaknya persoalan lingkungan di dalam negaranya.

Kebijakan Tiongkok dalam isu lingkungan baru terlihat serius setelah komitmennya dalam penandatanganan Paris Agreement di tahun 2016. Fokus Tiongkok dalam rezim-rezim lingkungan termasuk Paris Agreement mulai menunjukkan pergeseran yang cukup signifikan dan jelas. Di mana hal ini juga didorong oleh pergeseran arah kebijakan dan orientasi ekonomi Tiongkok yang semakin mengarah pada energi terbarukan dan lingkungan.

Pada tahun 2012, Tiongkok mulai membangun poros bisnisnya melalui energi terbarukan, yakni proyek mobil listrik. Hal ini juga telah terlihat dari “China’s Twelfth Five Year Plan” di tahun 2011-2015 yang menekankan bahwa core interest Tiongkok dalam ekonomi dan pembangunan sosial adalah mulai berfokus pada pengembangan strategi industri yang berasal dari sumber energi terbarukan yakni salah satunya adalah proyek mobil listrik yang diberi nama Electric Vehicles (Evs) (Marquis, Zhang and Zhou, 2013). Di tahun 2012, Pemerintah Tiongkok menargetkan produksi Evs (pure electric and hybrid electric vehicles) sebesar 500.000 di tahun 2015 dan semakin bertambah menjadi 5 milliar di tahun 2020 (Marquis, Zhang and Zhou, 2013). Hal ini dapat dikatakan sebagai langkah serius Tiongkok dalam mewujudkan salah satu core interest Tiongkok dalam ekonomi lingkungan. Adanya keterlibatan Tiongkok yang semakin besar dalam isu lingkungan ini merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan Beijing dalam mempromosikan sekaligus mencapai kepentingannya.

Keterlibatan Tiongkok yang besar dalam promosi rezim-rezim lingkungan merupakan langkah yang dinilai cerdas yang dilakukan Tiongkok dengan melihat urgensi isu lingkungan global saat ini. Dalam aspek domestik, dukungan Tiongkok terhadap Paris Agreement dapat dilihat sebagai salah satu upaya bisnis ekonomi lingkungan yang cukup menguntungkan. Dibarengi dengan pergeseran arah ekonomi ke energi yang terbarukan, komitmen Tiongkok dalam Paris Agreement dapat dijadikan sebagai faktor dukungan yang akan dilihat oleh banyak pihak. Singkatnya, dengan menunjukkan komitmen yang ambisius dalam Paris Agreement, Tiongkok dapat mempromosikan bisnis ekonominya selain juga sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan dampak lingkungan industrialisasinya dalam negeri.

Di sisi lain, masuknya Tiongkok dalam isu lingkungan serta peran yang besar sebagai Climate Leader akan menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi Beijing. Sebagai negara super power yang tengah berambisi untuk menuju pada posisi Great Power, Tiongkok membutuhkan reputasi yang sangat baik untuk dapat menggungguli Amerika Serikat dalam setiap aspek. Hal ini telah terlihat dalam beberapa hal. Salah satunya adanya perang dagang pada tahun 2018 yang bermula dari permasalahan pemberlakuan tarif tinggi sepihak atas AS terhadap Tiongkok yang berujung konflik dagang hingga tahun 2021 ini (Azmi, 2021). Kompetisi hegemoni politik di beberapa wilayah termasuk Samudra Pasifik dan negara sekitarnya (Odgaard, 2007). Politik vaksin global (Akhli, 2020), serta yang tidak kalah penting adalah isu lingkungan saat ini dalam konteks Paris Agreement untuk saling berebut sebagai leader global lingkungan paling berpengaruh. Kosongnya peran leader

lingkungan global karena hilangnya peran Amerika Serikat di dalamnya dinilai sebagai potensi besar yang coba dimanfaatkan oleh Tiongkok (Rochman, 2018).

Keputusan Amerika Serikat untuk memilih absen dalam rezim-rezim lingkungan termasuk Protokol Kyoto dilihat Tiongkok sebagai peluang untuk masuk menjadi leader global lingkungan di dalamnya. Lebih jauh, untuk mendukung hal ini Tiongkok juga terlihat semakin serius dalam mengambil langkah komitmen nyata dalam segala rezim lingkungan, termasuk Paris Agreement. Hal ini tercermin dari berbagai paket kebijakan yang dikeluarkannya memiliki sisi green policy dan menekankan pada pengatasan masalah perubahan iklim. Lebih dari itu, hal ini juga telah dikonfirmasi sendiri oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping melalui pernyataannya. Dalam melihat Paris Agreement, Xi Jinping menyebutnya sebagai “hard-won achievement” serta “all signators must stick to” dan janji komitmen Tiongkok untuk akan terus berupaya patuh dalam proyek pengurangan gas emisi demi menjaga perubahan iklim dalam isi Paris Agreement. Meskipun keputusan AS akan menarik diri, hal ini dikatakan tidak akan mengurangi komitmen Tiongkok (Bloomberg, 2017). Langkah dan keseriusan Tiongkok untuk ikut serta aktif dalam berbagai rezim lingkungan, termasuk Paris Agreement untuk menunjukkan keseriusan Beijing dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dinilai sebagai kepentingan Tiongkok dalam peratifikasian Paris Agreement pada 3 September 2016. Hal ini juga terlihat jika Beijing tengah sangat berambisi dalam implementasi serius Paris Agreement yang terlihat dalam pasal 9 yang berisi bahwa Tiongkok siap menjadi global leader yang mewakili negara maju dalam menyiapkan dan membantu negara-negara lain khususnya negara berkembang dalam ikut patuh dengan transfer teknologi di aspek lingkungan (Kemenkumham, 2016).

Jika disimpulkan, terdapat dua faktor utama yang menjadi kepentingan Tiongkok dalam meratifikasi Paris Agreement yakni:

1. Penyelesaian persoalan lingkungan domestik dan dukungan terhadap bisnis ekonomi lingkungan Tiongkok.
2. Menjadikan Tiongkok sebagai Global Green Leader dan Global Climate Leader.

Di mana adanya faktor kepentingan yang mendasari perilaku negara untuk patuh atau compliance terhadap suatu rezim merupakan bentuk perilaku independent self interest menurut Teori Mitchell. Oleh karena itu, dalam kasus Tiongkok dan Paris Agreement, perilaku Tiongkok untuk meratifikasi dan berkomitmen patuh terhadap Paris Agreement (Perjanjian Paris) merupakan bentuk independent self interest yang didorong oleh dua kepentingan besar Tiongkok dalam hal lingkungan di dalamnya yang kemudian akan mendorong tingkat kepatuhan yang besar dalam rezim ini.

Analisis Kepatuhan Tiongkok berdasarkan Teori Compliance Mitchell: Outputs, Outcome, Impact

Selanjutnya, kita akan berusaha menilai sudah sampai tahap mana upaya dan hasil perilaku Tiongkok dalam tingkat kepatuhannya atas Paris Agreement. Dalam teori Mitchell mengenai rezim lingkungan, kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim lingkungan dapat dilihat berdasarkan 3 variabel, yakni outputs, outcome, dan impact (Mitchell, 2007).

Walaupun penilaian kepatuhan Tiongkok dalam Paris Agreement masih terhitung terlalu awal dan dini untuk diklasifikasikan, namun demikian penilaian kepatuhan ini dapat dijadikan prediksi yang bagus dalam melihat kepatuhan Tiongkok secara progresif dan optimis di tahun 2030.

1. Outputs

Seperti yang dipaparkan dalam kerangka pemikiran, outputs adalah suatu kepatuhan yang akan dilihat dari bagaimana negara tersebut melakukan adopsi isi dan tujuan rezim internasional ke dalam bentuk kebijakan maupun regulasi domestiknya (Mitchell, 2007).

Dengan adanya tindakan negara yang memasukkan tujuan rezim dan melakukan penyesuaian kebijakan domestik untuk sejalan dengan tujuan rezim maka hal ini akan menunjukkan pula tingkat komitmen negara dalam suatu kesepakatan rezim.

Dalam melihat outputs Tiongkok terhadap Paris Agreement, pertama-tama adalah konsep kebijakan yang dibawa Tiongkok dalam pengimplementasian isi serta tujuan Paris Agreement. Di tahun 2016, Presiden Xi Jinping memutuskan untuk menandatangani Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Penandatanganan ini membuktikan kesiapan akan komitmen Tiongkok dalam mengurangi emisi karbonnya di tahun 2030 sebesar 20% (Sims Gallagher et al., 2019). Dalam pidato resminya pada Leaders Summit on Climate di Beijing tahun 2021, Xi Jinping menyebutkan bahwa Tiongkok akan berfokus penuh pada langkah kebijakan strategis dalam mengatasi permasalahan krisis perubahan iklim dengan menerapkan 6 langkah, diantaranya (Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, 2021):

- a. Harmonisasi kehidupan manusia dan alam dengan cara perlindungan dan pelestarian lingkungan.
- b. Komitmen dalam pelaksanaan kebijakan Green Development. Yakni dengan orientasi kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan produktivitas ramah lingkungan.
- c. Komitmen dalam tata kelola sistemik.
- d. Orientasi kebijakan yang berpusat pada manusia. Yakni dengan menumbuhkan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan penghapusan kemiskinan dengan prinsip perlindungan lingkungan.
- e. Kerjasama multilateralisme dalam pengatasan masalah lingkungan dan perubahan iklim dengan pihak luar atau negara lain.
- f. Komitmen dalam prinsip tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan secara bersama dengan peran negara maju sebagai pendonor teknologi lingkungan terhadap negara berkembang yang belum memiliki teknologi yang memadai (Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, 2021). Di mana hal ini sejalan dengan isi Paris Agreement pada pasal 4.

Lebih jauh, Xi Jinping juga mengatakan bahwa Tiongkok saat ini telah mengadopsi seluruh prinsip Paris Agreement yakni kemajuan dan konversi ekologis ke dalam seluruh rencana pembangunan dan kebijakan Tiongkok (Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, 2021). Tiongkok akan terus berkomitmen penuh dengan menjalankan prinsip ekologis dengan green development dan orientasi kebijakan pembangunan dan ekonomi rendah karbon. Selain itu Jinping juga berjanji akan melakukan kontrol ketat dalam membatasi peningkatan konsumsi batu bara selama periode rencana 5 tahun ke-14 Tiongkok dan menurunkan angka ini pada periode rencana 5 tahun ke-15 (Ministry of Foreign Affairs of The People's Republic of China, 2021). Beijing terus berupaya patuh terhadap tujuan Paris Agreement sebagai langkah nyata dan tanggung jawab dalam menjaga bumi dan menghindari perubahan iklim.

Langkah keseriusan ini juga diterapkan Tiongkok melalui kebijakan dan regulasi dengan membentuk Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) (Rochman, 2018). Komisi ini bertugas sebagai pemberi rekomendasi kebijakan kepada beberapa kementerian, diantaranya: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sains dan Teknologi, dan Administrasi Perlindungan Lingkungan Negara (SEPA) (Rochman, 2018). Selain itu, NDRC juga menjadi otoritas pengambilan keputusan Kebijakan Energi Utama Tiongkok. Pengambilan kebijakan untuk membentuk NDRC merupakan langkah bagus untuk terus menjamin dan mendorong kepatuhan Tiongkok lebih baik di masa mendatang.

Terakhir, outputs adopsi Paris Agreement oleh Tiongkok ini juga terlihat dari berubahnya orientasi kebijakan Tiongkok menjadi Green Development (Rochman, 2018). Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Strategi Kebijakan Green Economy, yakni melalui peningkatan dan pengembangan green industry dan green finance yang telah direncanakan pada 2011. Sistem produksi hijau atau green industry ini akan berfokus pada bisnis produksi berbasis teknologi terbarukan dan ramah lingkungan. Hal ini sebagai langkah untuk mendorong komitmen dan compliance Tiongkok untuk mengurangi produktivitas dari energi fosil dan mengurangi pengeluaran emisi karbon dan rumah kaca, di mana hal ini sejalan dengan isi serta tujuan dalam Paris Agreement.

2. Outcome

Kedua adalah outcome. Variabel ini akan dinilai dari adanya perubahan perilaku dari suatu negara untuk apakah mengarah pada compliance terhadap suatu rezim atau tidak. Dalam kasus Tiongkok dan complianceny terhadap Paris Agreement, dapat dikatakan compliance. Dibuktikan dengan adanya upaya Tiongkok untuk perlahan mengubah perilakunya sejalan dengan tujuan dan isi Paris Agreement khususnya pada pasal 7 yang memuat isi mengenai komitmen dalam ekonomi berbasis ramah lingkungan.

Berubahnya arah orientasi ekonomi dan produksi Tiongkok menjadi ekonomi ekologi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan menjadi satu kunci utama adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan Tiongkok untuk patuh terhadap isi Paris Agreement. Hal ini didukung pula oleh ambisi Tiongkok yang mulai berfokus dalam pengembangan industri mobil listrik. Meskipun industri ini masih terhitung baru dan memiliki resiko pengembangan, namun Tiongkok tetap optimis untuk menjadikan industri mobil listrik sebagai bagian dari implementasi Green Industry-nya. Hal ini sebagai upaya nyata Tiongkok untuk mengubah perilakunya berganti dari pemakaian industri pemanfaatan sumber energi tak terbarukan, yaitu fosil menjadi ke arah yang lebih ramah lingkungan, seperti listrik dan baterai (Marquis, Zhang and Zhou, 2013). Dalam membangun industrinya, Tiongkok juga melakukan kerjasama pengembangan dengan beberapa perusahaan internasional salah satunya adalah Tesla yang kemudian resmi diputus akibat konflik trust issue dengan Amerika Serikat. Namun demikian, dilansir dari Al-Jazeera, Tiongkok telah mampu melakukan pengembangan sempurna dan memproduksi mobil elektrik yang dapat menyaingi Tesla sebagai implementasi nyata atas strategi kebijakan Green Economy-nya (Al Jazeera, 2021). Selain itu di tahun 2021, Tiongkok juga menjalin kerjasama pengembangan mobil elektrik dengan Swedia (Danilovic et al., 2021). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa industri mobil elektrik menjadi implementasi nyata dari adanya perubahan perilaku Tiongkok yang dapat dikatakan berjalan compliance terhadap isi dan tujuan Paris Agreement yang dibuktikan dengan pengalihan produktivitas ekonomi sumber fosil menjadi sumber energi terbarukan yang mengurangi emisi pengeluaran karbon serta mencegah perubahan iklim yang lebih buruk.

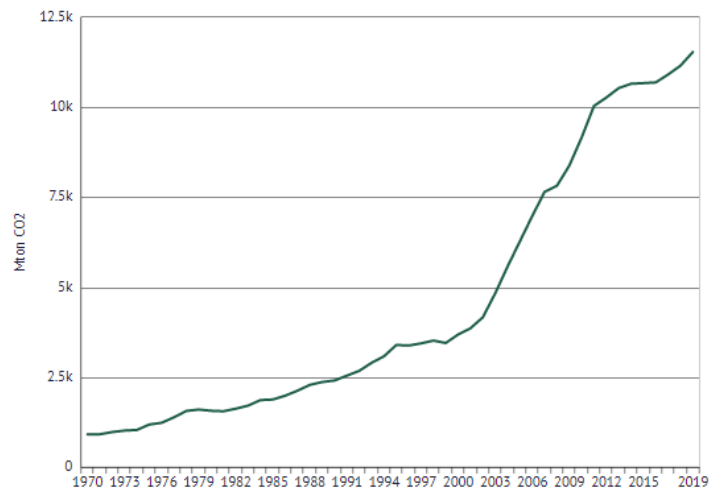
Lebih lagi, hal ini juga telah didukung dan dikonfirmasi secara resmi oleh Presiden Xi Jinping, bahwa pihaknya berjanji untuk terus mengurangi penggunaan sumber energi fosil dan menurunkannya secara bertahap hingga di tahun 2030.

3. Impact

Terakhir dalam impact, Compliance Tiongkok terhadap Paris Agreement akan dilihat berdasarkan dampak yang telah dihasilkan setelah ratifikasi rezim.

Untuk mendukung data terkait hal ini, penulis menyediakan data mengenai emisi pengeluaran karbon Tiongkok dan perbandingannya di tahun 1970-2019.

Figure 4. Grafik Emisi Karbon Tiongkok Tahun 1970-2019



Sumber: (Knoema, 2020)

Figure 5. Data Emisi Karbon Tiongkok 2010-2019

DATE	VALUE	CHANGE, %
2019	11,535.2	3.39 %
2018	11,157.1	2.25 %
2017	10,911.2	2.05 %
2016	10,691.8	0.19 %
2015	10,671.3	0.16 %
2014	10,653.9	1.15 %
2013	10,532.5	2.54 %
2012	10,271.4	2.33 %
2011	10,037.3	9.57 %
2010	9,160.8	9.34 %

Sumber: (Knoema, 2020)

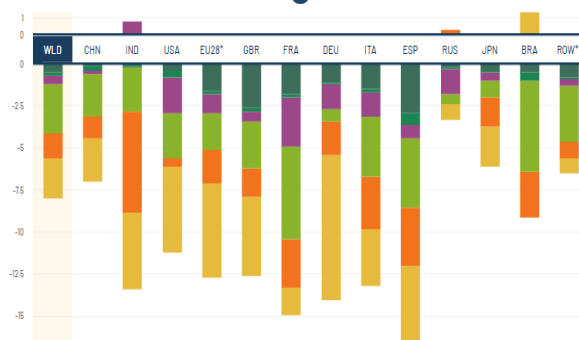
Jika melihat berdasarkan data tabulasi yang dipaparkan, angka kenaikan emisi pengeluaran karbon Tiongkok pada dasarnya memang masih menunjukkan angka kenaikan di tahun 2018-2019, yakni sebesar 1,14%. Namun demikian, angka kenaikan ini dapat dikatakan masih sangat kecil dibandingkan lonjakan kenaikan Tiongkok sebelum melakukan

ratifikasi atas Paris Agreement. Di tahun 2010-2011 angka emisi dan lonjakan ini terhitung sangat tinggi dan kenaikan angka 1,14% di 2019 dapat dikatakan masih dalam batas kenaikan yang wajar dan cukup stabil. Sementara di tahun 2015-2018, setelah ratifikasi Tiongkok atas Paris Agreement, angka emisi karbon Tiongkok telah banyak mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga hal ini dapat dikatakan menunjukkan komitmen compliance Tiongkok.

Lebih jauh, tingkat kepatuhan atau compliance Paris Agreement juga terlihat dengan keberhasilan menurunkan angka emisi karbon global pada 2019-2020 sebesar 6,3% dengan Tiongkok yang berhasil berkontribusi sebesar 1,4%.

Untuk lebih memperkuat bukti data, Carbon Monitor merilis data negara-negara dalam pengeluaran emisi gas karbon dan global pada tahun 2019-2020. Diantaranya adalah adanya keberhasilan dunia dalam penurunan emisi karbon global sebesar 8,1% (Carbon Monitor, 2020). Dengan Tiongkok yang berhasil menurunkan emisinya hingga pada angka 7,1% dengan rincian penurunan diantaranya: energi (2,6%), industri (1,3%), transportasi (2,5%), rumah tangga (0,2%), Aviasi domestik (0,3%), dan aviasi internasional (0,1%) (Carbon Monitor, 2020).

Figure 6. Emisi CO₂ Global 2019-2020



Sumber: (Carbon Monitor, 2020)

Selain itu, UNFCCC lewat laporan dan submissionnya di tahun 2020 juga memaparkan bahwa tingkat compliance Tiongkok menunjukkan angka yang bagus. Terbukti dengan tidak hanya berhasil berupaya dalam kebijakan strategisnya untuk mendukung pengurangan emisi karbon sesuai dengan Paris Agreement 2015, Tiongkok juga banyak memiliki kontribusi yang besar dalam mengembangkan tingkat compliance global. UNFCCC menjelaskan Tiongkok menjadi salah satu negara yang turut memberikan usulan kebijakan dan kegiatan guna mendukung implementasi Paris Agreement (UNFCCC, 2020). Tiongkok mengusulkan langkah strategis pada UNFCCC, yakni pengadaan pertemuan formal tingkat tinggi secara rutin yang akan dipergunakan sebagai forum dalam pembahasan, seperti teknik implementasi, diskusi pembahasan implementasi, dan melibatkan NGO lingkungan sebagai stakeholders pendukung (UNFCCC, 2020). Hal ini dilakukan Tiongkok sebagai upaya nyata atas tanggung jawab Climate dan Green Leaders yang tengah diembannya.

Berdasarkan seluruh data dan pemaparan dalam variabel impact, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok telah menunjukkan keberhasilan kepatuhannya terhadap rezim Paris Agreement. Dengan bukti bahwa Tiongkok telah berhasil mengalami penurunan dalam pengeluaran emisi karbonnya di beberapa tahun pasca ratifikasi. Compliance ini merupakan tingkat kepatuhan Tiongkok dalam periode awal yakni 2015-2020 yang dapat digunakan sebagai prediksi awal yang bagus untuk melihat tingkat optimisme dan keseriusan Tiongkok dalam menyelesaikan compliance terhadap Paris Agreement di tahun 2030.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Compliance oleh Ronald B. Mitchell, faktor Tiongkok untuk melakukan ratifikasi terhadap Paris Agreement merupakan bentuk perilaku self interest atau kepentingan nasional Tiongkok. Adanya kepentingan Tiongkok dalam dua hal yakni sebagai upaya penyelesaian persoalan lingkungan domestik dan dukungan terhadap bisnis ekonomi ekologisnya serta kepentingan Tiongkok menjadi Green Leader dan Climate Leader Global akan mendorong juga tingkat kepatuhan dan compliance Tiongkok dalam Paris Agreement.

Hal ini dibuktikan oleh keberhasilan Tiongkok dalam tingkat compliancenyang yang baik terhadap Paris Agreement dengan menurunkan emisi karbonnya di beberapa periode tahun setelah ratifikasi. Selain itu ditinjau dari outputs, outcome, dan impact Tiongkok telah dikatakan berhasil dalam melakukan compliance atau kepatuhannya terhadap Paris Agreement dengan melalui adopsi kebijakan domestik menjadi Green Policy, perubahan perilaku untuk mulai menggunakan sumber energi terbarukan, dan angka penurunan emisi karbon.

Dengan demikian, dalam periode lima tahun tersebut (2015-2020), Tiongkok dapat dikatakan compliance terhadap Paris Agreement. Hal ini juga dapat menjadi langkah awal yang baik dalam memprediksikan tingkat compliance Tiongkok yang semakin progresif dan optimis hingga di tahun 2030.

REFERENCE

- Akhli, R. A. dan G. R. S. (2020). Kepentingan Politik Donald Trump Dan Xi Jinping Dalam Meningkatkan Relasi Konfliktual Antara As-Tiongkok Di Masa Pandemi Covid-19 Donald. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 235–253.
- Azmi, F. (2021). Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok di Masa Pandemi COVID-19. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(1), 32–48. doi: 10.24198/PADJIR.V3I1.29605.
- Bloomberg. (2017). *Xi at Davos Urges Trump to Stay in 'Hard Won' Paris Climate Deal - Bloomberg*. Retrieved June 7, 2021, from <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-16/climate-experts-see-xi-to-uting-clean-energy-leadership-at-davos>
- Carbon Monitor. (2020). *Carbon monitor, 2020*. Retrieved June 7, 2021, from <https://carbonmonitor.org/>
- Danilovic, M. et al. (2021). *In cooperation with Tomas Müllern*.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Gas Rumah Kaca | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY*. Retrieved June 7, 2021, from <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/mengenal-lebih-dekat-gas-rumah-kaca> (Accessed: 7 June 2021).
- Al Jazeera. (2021). *In China, a little-known EV maker is leaving Tesla in the dust | Automotive Industry News*. Retrieved June 7, 2021, from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/economy/2021/6/7/in-china-a-little-known-ev-car-firm-is-beating-tesla-and-others>
- Kemenkumham. (2016, September). Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change', *Undang Undang No 16 Tahun 2016*
- Marquis, et.al. (2013) *China's Quest to Adopt Electric Vehicles*. Retrieved June 7, 2021, from www.ssireview.org
- Ministry of Foreign Affairs of The People's Republik of China. (2021). *Xi Jinping*

Attends the Leaders Summit on Climate and Delivers an Important Speech.

Retrieved June 7, 2021, from

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1871057.shtml

Mitchell, R. B. (2007). *COMPLIANCE THEORY COMPLIANCE, EFFECTIVENESS, AND BEHAVIOR CHANGE IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW*. Retrieved June 7, 2021, from <https://rmitchel.uoregon.edu/sites/rmitchel1.uoregon.edu/files/resume/chapters/2007-OxfordHandbookIEL.pdf>

Odgaard, L. (2007). The balance of power in Asia-Pacific security: U.S.-China policies on regional order. *Korean Journal of Defense Analysis*. Korean Institute for Defense Analysis, 19(1), 29–46. doi: 10.1080/10163270709464126.

Rochman, A. F. (2018) ‘RATIFIKASI TIONGKOK ATAS PERJANJIAN PARIS PADA KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM 2015’, 151, pp. 10–17. doi: 10.1145/3132847.3132886.

Royal Society, T. (2020). *Climate Change: Evidence & Causes 2020*. Retrieved June 7, 2021, from <https://www.nap.edu/catalog/18373>]

Sims Gallagher, K. *et al.* (2019). Assessing the Policy gaps for achieving China’s climate targets in the Paris Agreement. doi: 10.1038/s41467-019-09159-0.

Statista. (n.d). *Global historical CO2 emissions 1758-2020 | Statista, 2020*. Available at: <https://www.statista.com/statistics/264699/worldwide-co2-emissions/> (Accessed: 7 June 2021).

Trading Economics. (n.d). *China Industrial Production | 1990-2021 Data | 2022-2023 Forecast | Calendar, 2020*. Retrieved June 7, 2021 from <https://tradingeconomics.com/china/industrial-production>

UNFCCC. (2015). *Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 11 December 2015. Part one: Proceedings.*

UNFCCC. (2020). *China’s Submission on ‘Pre-2020 Implementation and Ambition’ Round Table.*

UNFCCC. (2021). *UNFCCC, 2021*. Retrieved June 7, 2021, from <https://unfccc.int/>

UNTC. (2015, December 12). *Chapter XXVII Environment*. Retrieved June 7, 2021,

from

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI

[I-7-d&chapter=27&clang=_en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI&chapter=27&clang=_en)